

DIGITALISASI DESA DALAM PERSPEKTIF *GOVERNMENTALITY* Studi Kasus Kalurahan Sambirejo, Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman

Supriyani^{1*} Yuli Setyowati²

¹Magister Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD, Jl. Timoho 317, Yogyakarta 55225, Indonesia

² Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”, Jl. Timoho 317, Yogyakarta 55225, Indonesia

*Corresponding author: supriyani.utomo@gmail.com

ABSTRAK

Tranformasi digital di Indonesia mereformasi layanan publik berbasis elektronik di seluruh level pemerintahan, termasuk di pemerintah desa. Kementerian terkait dan pemerintah daerah memiliki serangkaian program untuk membangun desa digital atau sebutan lainnya. Penelitian ini mengkaji penyelenggaraan digitalisasi desa dari perspektif *governmentality* dengan studi kasus Kalurahan Sambirejo, Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebagai kalurahan terbaik di Kabupaten Sleman, penyelenggaraan layanan digitalisasi desa di Kalurahan Sambirejo belum terinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari warga Sambirejo disebabkan adanya permasalahan terkait keterbatasan sinyal internet, kapasitas masyarakat akan kepemilikan *smartphone* yang sesuai dengan aplikasi, dan keterbatasan kapasitas masyarakat lansia penggunaan teknologi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis deskriptif dengan metode kajian studi kasus. Teknik pemilihan informan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria informan adalah aktor utama dalam penyelenggaraan digitalisasi desa di Kalurahan Sambirejo. Data penelitian dikumpulkan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data tersebut diproses melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan dengan teknik pemeriksaan keabsahan data yaitu triangulasi.

Kesimpulan hasil analisis berdasarkan empat dimensi menurut Mitchell Dean yaitu digitalisasi desa di Kalurahan Sambirejo diselenggarakan dengan: (1) visibilitas pemerintah yang jelas, (2) aspek teknis yang cukup memadai, (3) landasan rasional telah sesuai kondisi ideal/tujuan sebuah program pemerintah namun secara realita masih “menuju” tujuan tersebut, dan (4) pembentukan identitas yang memerlukan penguatan edukasi dan literasi digital. Hasil kajian penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi sebagai bagian dari upaya perbaikan penyelenggaraan digitalisasi desa di Indonesia.

Kata kunci: *Digitalisasi, Desa, Governmentality*

ABSTRACT

Digital transformation in Indonesia is reforming electronic-based public services at all levels of government, including village government. Relevant ministries and local governments have a series of programs to build digital villages or other designations. This research examines the implementation of village digitization from a governmentality perspective with a case study of Sambirejo Village, Kapanewon Prambanan, Sleman Regency, Special Region of Yogyakarta. As the best urban village in Sleman Regency, the implementation of village digitization services in Sambirejo Village has not been internalized in the daily lives of Sambirejo residents due to problems

related to limited internet signals, community capacity to own smartphones that are compatible with applications, and limited capacity of elderly people to use technology.

This research uses a descriptive qualitative approach with a case study method. The informant selection technique used a purposive sampling technique with the criteria for informants being the main actors in implementing village digitization in the Sambirejo Village. Research data were collected by interview, observation, and documentation techniques. The data is processed through the stages of data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions with the technique of checking the validity of the data, namely triangulation.

The conclusion of the analysis results is based on four dimensions according to Mitchell Dean, namely village digitalization in the Sambirejo subdistrict is carried out with: (1) clear government visibility, (2) sufficient technical aspects, (3) rational foundations in accordance with the ideal conditions/goals of a government program but in reality it is still "towards" this goal, and (4) identity formation which requires strengthening education and digital literacy. The results of this research study are expected to contribute as part of efforts to improve village digitization in Indonesia.

Keywords: *digitization, village, governmentality*

PENDAHULUAN

Di Indonesia, kehadiran era digital diterima dengan sangat progresif. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) telah mempunyai peta jalan Indonesia digital 2021-2024 dan sudah mempunyai kesepakatan ASEAN digital *masterplan* 2025 (Elisabeth, 2022). Pemerintah melalui Kementerian terkait memiliki orientasi jangka panjang untuk membangun desa digital atau sebutan lainnya sebagai langkah strategis demi mewujudkan Indonesia berkemajuan.

Digitalisasi desa hadir dalam berbagai program dari Kementerian terkait, dalam hal ini antara lain Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) maupun Kementerian Koordinator Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo). Program digitalisasi desa ini banyak ragamnya, seperti program desa pintar (*Smart Village*) dari Kemendes PDTT, program Desa Digital, program Desa Punya Internet (Desa Pinter) atau sebutan lainnya. Pada dasarnya program digitalisasi desa adalah menciptakan tata kelola dan layanan desa berbasis digital sebagaimana muncul dengan wujud berbagai aplikasi, *website* atau layanan elektronik lainnya.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) meluncurkan Program Desa Cerdas (*smart village*) untuk meningkatkan literasi dan pemahaman digital di tingkat pemerintahan terendah. Target program ini adalah tercapainya 3.000 Desa Cerdas di 2024. *Smart village* adalah pembangunan desa yang berbasis penerapan teknologi tepat guna. Konsep ini menjadikan internet sebagai sarana mencapai kemajuan dan akan membuat Indonesia menjadi lebih siap menyongsong masa depan (Kharisma, 2021). Digitalisasi desa melalui konsep desa cerdas (*smart village*) diharapkan mampu menjadi inisiator untuk desa-desa yang ada di seluruh Indonesia.

Pada saat Kemendes PDTT menjalankan Program Desa Cerdas, Kemkominfo melalui Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan (LAIP) pun mempunyai program Desa Digital. Program ini, akan memberikan bimbingan teknis (bimtek) kepada operator dan pemerintah desa untuk sudah mulai memberikan layanan-layanan secara *online*. Seperti halnya tata pemerintahan ataupun sistem informasi yang kini perlu ditingkatkan dengan mulai memanfaatkan TIK, sehingga dapat dilakukan dan dimonitor secara *online* (Aptika, 2021).

Program Desa Digital merupakan program penyediaan internet dan literasi digital masyarakat. Program ini bertujuan untuk menyediakan akses internet di desa yang sebelumnya tidak memiliki koneksi internet sama sekali. Secara konseptual desa digital merupakan sebuah program untuk menjadikan desa sebagai wilayah pembangunan yang memberdayakan masyarakat dengan sarana teknologi informasi yang memadai.

Desa digital memiliki dua unsur penting di dalamnya, yakni pemberdayaan masyarakat desa dan teknologi informasi. Pembangunan desa melalui internet penting untuk kemudian diterapkan di tengah perkembangan teknologi dan komunikasi. Pemanfaatan teknologi secara optimal dapat meningkatkan partisipasi desa. Melalui sistem desa digital, segala informasi desa akan lebih mudah untuk diakses, baik oleh perangkat desa maupun warga sekitar. Hal inilah yang akan menjadikan desa bukan hanya sebatas pada pemerintahan formil, lebih daripada itu menjelma menjadi desa yang benar-benar memberikan kontribusi untuk pembangunan berkelanjutan suatu bangsa (Rohman, 2022).

Tidak dapat dipungkiri, era teknologi yang semakin berkembang dengan sangat pesatnya telah merambah pada setiap sendi kehidupan. Fenomena ini juga terjadi pada tata kelola pemerintahan desa. Jika berkaca pada masa lalu, dimana bentuk-bentuk administrasi pemerintahan desa masih dikerjakan secara manual dengan mesin ketik untuk semua urusan administrasi pemerintahan desa. Pada prosesnya, teknologi mengarahkan dan merubah semua keadaan tersebut, penggunaan komputer dan laptop menjadi salah satu kepentingan yang sangat mendasar guna terselesaikannya segala macam kepentingan administrasi. Selain teknologi perangkat keras (*hardware*) seperti komputer dan laptop, printer dan perangkat lainnya, tata kelola desa juga dijalankan dengan perangkat lunak (*software*) berupa aplikasi-aplikasi.

Digitalisasi akan membawa kemanfaatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat apabila dapat terselenggara dengan lebih baik. Kajian pada penelitian ini dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta yakni tepatnya di Kalurahan Sambirejo, Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman. Sebagaimana diketahui bahwa Yogyakarta merupakan salah satu provinsi dengan kesiapan perkembangan industri 4.0 terbaik di Indonesia. Hal ini berdasarkan data Badan Pusat Statistik bahwa Yogyakarta menempati urutan kedua setelah Jakarta dalam Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) 2017 (Faisal, 2019).

Terkait dengan tema tulisan ini bahwa evaluasi bidang pemerintahan ini meliputi aspek pemerintahan, kinerja, inisiatif dan kreativitas dalam pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan berbasis teknologi informasi atau *e-government*, serta pelestarian adat dan budaya (Binapemdes, 2022) sehingga dapat diketahui bahwa terkait digitalisasi, Kalurahan Sambirejo terdepan diantara kalurahan se-Kabupaten Sleman. Kalurahan Sambirejo pun terpilih sebagai kalurahan terbaik se-Kabupaten Sleman tahun 2022 didasarkan pada sejumlah inovasi yang telah dilakukan guna memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat. Kalurahan Sambirejo ini juga sudah menerapkan *smart village* yang mana kegiatan pelayanan masyarakat sudah dilakukan secara digital melalui *Command Center* yang ada di kantor Kalurahan Sambirejo (Slemankab, 2022). Selanjutnya, dengan terpilihnya Kalurahan Sambirejo sebagai terbaik I se-Kabupaten Sleman, maka Kalurahan Sambirejo maju ke tingkat selanjutnya mewakili Kabupaten Sleman pada Evaluasi Perkembangan Kalurahan tingkat DIY Tahun 2022 (Prambanan, 2022).

Pada bulan Februari tahun 2023, Kalurahan Sambirejo ditetapkan sebagai lokasi Desa Cerdas berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 66 Tahun 2023 Tentang Penetapan 1650 Desa Lokasi Desa Cerdas Fase III tahun 2023. Dalam Keputusan tersebut disebutkan bahwa penetapan Desa Cerdas merupakan bagian tak terpisahkan dari Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) Tahun 2021-2024 yang ditujukan untuk mendorong pembangunan desa yang inovatif dalam memecahkan permasalahan dengan memanfaatkan teknologi digital. Sederet pencapaian tersebut tidak berbanding lurus dengan kenyataan sebenarnya di tingkat masyarakat, berdasarkan observasi penulis diketahui bahwa digitalisasi yang diselenggarakan Pemerintah Kalurahan Sambirejo ini belum terinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Sambirejo. Pemerintah Kalurahan dan masyarakat Sambirejo menghadapi beberapa permasalahan seperti infrastruktur terkait sinyal atau akses jaringan *internet*, kapasitas masyarakat akan kepemilikan *smartphone* yang sesuai dengan aplikasi, dan keterbatasan kapasitas masyarakat khususnya lansia terkait penggunaan teknologi. Fenomena-fenomena tersebut mendasari mengapa penelitian ini dilakukan.

Fokus penelitian ini adalah mengkaji penyelenggaraan digitalisasi desa di Kalurahan Sambirejo, Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman dengan perspektif *governmentality*. Digitalisasi desa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pelaksanaan transformasi atau

proses pengalihan bentuk kerja/layanan dari konvensional ke format digital di kalurahan tersebut. Adapun informasi atau data yang digali kepada informan penelitian antara lain:

1. Regulasi dan tahap awal pembangunan digitalisasi desa, termasuk regulasi yang dipatuhi, motivasi awal pemerintah kalurahan, dan pendanaannya;
2. Pelaksanaan digitalisasi desa, termasuk dalam hal ini apa saja layanan digital yang dikembangkan atau jenis platform media digital yang digunakan pemerintah kalurahan; pembangunan, pengembangan dan pelaksanaan digitalisasi desa; kendala atau permasalahan yang muncul dan apa yang telah dilakukan dalam menghadapinya; teknis pendampingan dan pengawasan.
3. Output pelaksanaan digitalisasi desa, yakni terkait dampak atau manfaat pelaksanaan digitalisasi termasuk peningkatan *income* masyarakat/kesejahteraan dan partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan pemerintah kalurahan Sambirejo.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “bagaimana penyelenggaraan digitalisasi desa dalam perspektif *governmentality*? Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: 1) mendeskripsikan penyelenggaraan digitalisasi desa di Kalurahan Sambirejo, Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman; dan 2) menganalisis penyelenggaraan digitalisasi desa di Kalurahan Sambirejo, Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman dengan perspektif *governmentality*, dengan menggunakan 4 dimensi sebagaimana teori Mitchell Dean (2010) yaitu a) visibilitas pemerintah, b) aspek teknis pemerintah, c) rasionalisasi pemerintah, dan d) pembentukan identitas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2017) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang perilaku yang dapat diamati. Adapun penelitian deskriptif ditujukan untuk mendeskripsikan suatu keadaan apa adanya. Selain itu penelitian ini menggunakan studi kasus sebagai metode kajiannya. Menurut Yin (2008), metode penelitian studi kasus merupakan strategi yang tepat untuk digunakan dalam penelitian yang menggunakan pokok pertanyaan penelitian *how* atau *why*, sedikit waktu yang dimiliki peneliti untuk mengontrol peristiwa yang diteliti, dan fokus penelitiannya adalah fenomena kontemporer, untuk melacak peristiwa kontemporer. Selain itu metode studi kasus juga memiliki keunggulan karena pengungkapan atau pemaparan dilakukan secara komprehensif sehingga menghasilkan pengetahuan yang relevan.

Penulis memilih Kalurahan Sambirejo sebagai lokasi studi kasus penelitian ini dengan pertimbangan berbagai alasan yakni Kalurahan Sambirejo adalah pemegang peringkat pertama dalam lomba Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Epdeskel) di tingkat Kabupaten Sleman (Slemankab, 2022). Epdeskel sebagaimana disebutkan dalam Permendagri No. 81 tahun 2015 merupakan suatu upaya penilaian tingkat penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang didasarkan pada instrumen evaluasi perkembangan desa dan kelurahan guna mengetahui efektivitas dan status perkembangan serta tahapan kemajuan desa dan kelurahan. Adapun indikator penilaiannya mencakup 3 (tiga) bidang yaitu, evaluasi bidang pemerintahan, evaluasi bidang kewilayahan, dan evaluasi bidang kemasyarakatan.

Data penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dan observasi lapangan. Penulis menggunakan wawancara terstruktur sehingga daftar pertanyaan atau panduan wawancara telah tersusun sebelum melakukan wawancara dengan informan. Pada saat wawancara, penulis merekam dengan handphone agar semua informasi dari informan tercatat dan tertangkap seluruhnya oleh penulis. Dalam proses ini akan dihasilkan rekaman wawancara, transkrip wawancara dan catatan lapangan. Adapun data sekunder dikumpulkan melalui dokumentasi tertulis atau berupa file, foto, studi pustaka dari jurnal atau sumber lain yang digunakan untuk mendukung data primer. Data sekunder disini antara lain data profil dan demografi desa, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kalurahan (RPJM-Kal) Sambirejo.

Informan adalah orang-orang yang ada pada latar penelitian, yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Informan dimanfaatkan untuk berbicara, bertukar pikiran, atau membandingkan suatu kejadian yang ditemukan dari subjek lainnya (Moleong, 2017) yang dipilih dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data yang didasarkan dengan pertimbangan tertentu yang berkaitan dengan studi kasus yang diteliti dan tujuan peneliti (Sugiyono, 2019). Kriteria informan yang telah dipilih oleh penulis yakni mereka yang mempunyai jabatan dan pekerjaan yang terkait dengan tema penelitian yakni penyelenggaraan digitalisasi desa.

Teknik analisa data menggunakan tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan (Miles dan Huberman dalam Burhan Bungin, 2012). Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi. yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Dengan kata lain, peneliti dapat mengecek ulang temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber atau teori Moleong (2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Istilah *governmentality* dimunculkan oleh Mitchell Dean dalam buku "*Governmentality Power and Rule in Modern Society*" berkaitan dengan bagaimana kita berpikir tentang mengatur (*governing*), namun dengan rasionalitas yang berbeda, atau hal ini terkadang disebut pula dengan 'mentalitas pemerintah' (*mentality of government*). Menurut Foucault, studi tentang *governmentality*, lebih memperhatikan bagaimana pemikiran berjalan dalam cara yang terorganisir dalam melakukan sesuatu, praktik rezim, dan dengan ambisi dan efeknya (Dean, 2010). Jadi menganalisis "mentalitas pemerintah" berarti menganalisis pemikiran yang dibuat praktis dan teknis.

Selain menunjukkan hubungan antara pemerintah dan pemikiran, pengertian *governmentality* memiliki makna kedua dalam karya Foucault. Makna *governmentality* kedua ini menandai munculnya bentuk pemikiran dan praktek kekuasaan dalam masyarakat tertentu. Bentuk kekuasaan ini terkait dengan penemuan realitas baru, ekonomi, dan berkaitan dengan objek baru yaitu populasi atau penduduk. *Governmentality* muncul dalam masyarakat Eropa Barat pada 'periode modern awal' ketika "seni pemerintahan" negara menjadi aktivitas tersendiri, dan ketika bentuk pengetahuan dan teknik dari ilmu manusia dan sosial menjadi integral di dalamnya. Terkait hal tersebut, Mitchell Dean mencatat beberapa aspek dari makna *governmentality* yang dibatasi secara historis dalam kuliah yang diberikan Foucault (Dean, 2010), yakni antara lain:

Pertama, munculnya pemerintahan modern (*modern governmentality*) dapat diidentifikasi melalui rezim pemerintahan tertentu yang mengambil objek "penduduk" dan munculnya ekonomi politik. Pemerintah akan diminta untuk menjadi pemerintahan '*each and all*', yang menunjukkan kepedulian terhadap setiap individu dan penduduk secara keseluruhan. Dengan demikian pemerintahan akan berkaitan dengan kesehatan, kesejahteraan, kemakmuran dan kebahagiaan dari penduduknya.

Kedua, gagasan *governmentality* menyiratkan hubungan tertentu antara pemerintah dengan bentuk kekuasaan lainnya, khususnya kedaulatan dan ketertiban. Dalam kuliah Foucault sebelum menggunakan *governmentality*, kedaulatan dicirikan sebagai teori dan praktek pemerintahan administrasi kerajaan dimulai dengan aktualitas monarki feodal, sebagai elemen dalam kontes atas batas dan kekuatan kekuasaan kerajaan, dan kemudian memberikan alternatif model demokrasi parlementer. Mekanisme karakteristiknya adalah konstitusi, hukum, dan parlemen. Sedangkan ketertiban memiliki sejarah panjang, dengan asal-usul yang beragam dalam praktik monastik, militer, dan pendidikan. Hal ini menyangkut pelaksanaan kekuasaan atas individu, kekuatan dan kapasitasnya lembaga, dan komposisi kumpulan individu manusia seperti kelas sekolah, tentara, dll.

Ketiga, *governmentality* berusaha untuk membingkai penduduk dalam apa yang disebut Foucault sebagai aparat keamanan (*apparatuses of security*). Secara konvensional, aparat keamanan ini akan mencakup penggunaan tentara tetap, pasukan polisi, korps diplomatik, dinas

intelijen, dan mata-mata. Dalam catatan Foucault, itu akan mencakup semua praktik dan institusi yang memastikan berfungsinya proses ekonomi, proses sosial yang vital bagi penduduk yang mencakup sistem kesehatan, kesejahteraan dan pendidikan.

Dua poin terakhir mengarahkan Foucault untuk menyimpulkan bahwa terdapat tiga bentuk kekuasaan yaitu kedaulatan, ketertiban, dan manajemen pemerintahan yang menjadikan penduduk sebagai target utamanya dan aparat keamanan sebagai mekanisme esensialnya. Alih-alih menggantikan ketertiban atau kedaulatan, "seni pemerintahan" modern menyusunnya dalam kepedulian terhadap peningkatan atas kesejahteraan, kesehatan, kebahagiaan, kemakmuran dan efisiensi bagi penduduk, serta dalam bentuk pengetahuan dan sarana teknis yang sesuai untuknya.

Karakteristik terakhir dari *governmentality* yang ditekankan oleh Foucault adalah kecenderungan, garis kekuatan yang terus-menerus mengarah pada keunggulan atas semua jenis kekuasaan lainnya atau kedaulatan, ketertiban, dan jenis kekuasaan yang bisa kita sebut "pemerintah" (*government*). Untuk itu, muncullah perspektif terkait analitik pemerintah atau *analytics of government*. Menurut Foucault, analisis ini berkaitan dengan analisis kondisi spesifik di mana entitas tertentu muncul, ada, dan berubah. Analitik pemerintah memeriksa kondisi di mana rezim praktik (*regime of practices*) muncul, dipertahankan, dan diubah. Dalam arti dasar, rezim praktik hanyalah seperangkat cara yang cukup koheren untuk melakukan sesuatu. Itu adalah cara-cara yang terorganisir, pada waktu dan tempat tertentu, seperti mereformasi, dan mempraktekkan hal-hal misalnya merawat, mengelola, menasihati, menyembuhkan, menghukum, mendidik, dan sebagainya. Salah satu ciri dari rezim praktis adalah program-program reformasi perilaku (Dean, 2010).

Adapun kerangka analitik pemerintah mengambil perhatian utama pada bagaimana mengatur dan diatur dalam rezim yang berbeda, dan kondisi di mana rezim tersebut muncul, beroperasi, dan diubah. Analitik pemerintah menekankan pertanyaan 'bagaimana' kepada 4 (empat) dimensi berikut untuk melihatnya yaitu visibilitas pemerintah, aspek teknis pemerintah, rasionalisasi pemerintah, dan pembentukan identitas. Dan pada penelitian tentang *governmentality* yang pernah dilakukan, memberikan sejumlah indikasi tentang bagaimana melakukan analitik pemerintahan tersebut dengan menggunakan keempat dimensi tersebut (Dean, 2010). Dimensi-dimensi ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Visibilitas pemerintah

Visibilitas menyangkut gambaran "siapa dan apa yang akan diatur", "bagaimana hubungan pemerintah dan kepatuhan", "bagaimana berbagai institusi/lembaga berkaitan satu sama lain", dan "masalah apa yang harus dipecahkan dan tujuan apa yang dicari" dalam sebuah program pemerintah. Dengan demikian, sebagai penilaiannya, apabila visibilitas pemerintah kurang maka cara atau program pemerintah yang diselenggarakan akan berisiko tinggi gagal atau berdampak tidak baik (Dean, 2010). Dalam tulisan ini, dimensi visibilitas pemerintah dalam penyelenggaraan digitalisasi desa di Kalurahan Sambirejo akan menganalisis hubungan pihak-pihak terkait dan aturan, hubungan pemerintah kalurahan dengan pemerintah di atasnya, masalah yang dihadapi dan tujuan yang akan dicapai dalam program digitalisasi desa tersebut.

2. Aspek teknis pemerintah

Dimensi ini berkenaan dengan aspek teknis pemerintahan, yang disebut sebagai teknik pemerintahan (*techne of government*). Dimensi ini akan terkait dengan pertanyaan "dengan cara, mekanisme, prosedur, instrumen, taktik, teknik, teknologi dan peristilahan seperti apa otoritas dibentuk dan aturan dicapai?" (Dean, 2010). Dalam tulisan ini, dimensi aspek teknis pemerintah dalam penyelenggaraan digitalisasi desa di Kalurahan Sambirejo akan menganalisis mekanisme dan prosedur program, instrumen atau *platform* media digital yang digunakan, dan hal teknis lainnya.

3. Rasionalisasi pemerintah

Istilah "rasionalisasi" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (kbbi, 2023) adalah proses, cara, perbuatan menjadikan bersifat rasional. Dalam hal ini "rasionalisasi pemerintah" dapat diterjemahkan sebagai perbuatan pemerintah merasionalkan program yang dijalkannya. Secara teori, dimensi ini berkaitan dengan cara khusus untuk bertindak, mengintervensi dan

mengarahkan, terdiri dari jenis rasionalitas praktis tertentu, dan mengandalkan mekanisme, teknik, dan teknologi tertentu. Dimensi dari praktik pemerintahan ini menyangkut bentuk-bentuk pengetahuan yang muncul dari dan menginformasikan aktivitas pemerintahan. Hal ini disebut Mitchell Dean dengan istilah *episteme* pemerintahan (*the episteme of government*). Dan pertanyaan yang menggambarkannya adalah “bentuk pemikiran, pengetahuan, keahlian, strategi, alat perhitungan, atau rasionalitas apa yang digunakan dalam praktik pemerintahan?”, “bagaimana pikiran berusaha mengubah praktik-praktik ini?” “bagaimana praktek-praktek pemerintahan memunculkan bentuk-bentuk tertentu dari kebenaran?”, dan “praktek pemerintah ini terkait dengan program perilaku?” (Dean, 2010).

Rasionalisasi program di sini akan terkait pada tujuan pemerintahan modern sebagaimana aspek pertama dalam makna *governmentality* di atas, bahwa pemerintahan modern hadir untuk memastikan kebahagiaan dan kemakmuran penduduk. Hal ini sebagaimana dalam artikel yang ditulis Tania Murray Li, Foucault mendefinisikan *governmentality* secara ringkas sebagai *conduct of conduct*, yang dapat diartikan bahwa pemerintah melakukan upaya untuk membentuk perilaku masyarakat dengan cara yang diperhitungkan. Perhatian pemerintah adalah kesejahteraan masyarakat secara luas. Tujuannya adalah untuk mengamankan kesejahteraan penduduk, perbaikan kondisinya, peningkatan kekayaannya, umur panjang, kesehatan, dan sebagainya (Li, 2007). Dalam tulisan ini, dimensi rasionalitas pemerintah dalam penyelenggaraan digitalisasi desa di Kalurahan Sambirejo akan menganalisis tujuan penyelenggaraan program, manfaat atau dampak yang akan didapatkan penduduk atau pengguna dari aplikasi berbagai platform media digital yang ada.

4. Pembentukan identitas

Dimensi pembentukan identitas ini berkaitan dengan bentuk identitas individu dan kolektif yang melaluinya pemerintahan menjalankan programnya. Adapun secara arti kata “identitas” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (kbbi, 2023) adalah ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang, atau jati diri. Dimensi ini akan bertanya sehubungan dengan pertanyaan seperti seperti “bentuk pribadi, diri, dan identitas apa yang diandaikan oleh berbagai praktik pemerintahan dan jenis transformasi apa yang dicari oleh praktik-praktik ini?”, “status, kapasitas, sifat, dan orientasi apa yang diasumsikan dari mereka yang menjalankan otoritas dan mereka yang akan diatur?”, “bentuk perilaku apa yang diharapkan dari mereka?”, “apa kewajiban dan hak yang mereka miliki?”, “bagaimana kapasitas dan atribut ini dikembangkan?” “bagaimana kewajiban-kewajiban ini ditegakkan dan hak-hak dijamin?”, “bagaimana aspek perilaku tertentu bermasalah?”, “bagaimana mereka kemudian direformasi?”, dan seterusnya (Dean, 2010). Pembahasan dimensi pembentukan identitas dalam penyelenggaraan digitalisasi desa di Kalurahan Sambirejo adalah masyarakat seperti apa yang akan terbentuk dalam mekanisme penyelenggaraan berbagai layanan digital tersebut.

Keempat dimensi pemerintahan ini mengandalkan satu sama lain dan tidak dapat direduksi satu sama lain. Perubahan atau perkembangan yang terjadi terjadi pada salah satu dimensi dapat menyebabkan transformasi pada dimensi lainnya.

1. Penyelenggaraan Digitalisasi Desa di Kalurahan Sambirejo, Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman

Pengembangan layanan Kalurahan Sambirejo dengan digitalisasi berawal dari Hibah PT Telkom tahun 2019. Pada tahun 2020 sudah dimulai dikerjakan, dan tahun 2021 mulai tahap pemanfaatannya. Pada tahun 2022 Pemerintah Kalurahan Sambirejo membentuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang salah satu tugasnya membantu pemerintah kalurahan dalam menjelaskan lebih detail terkait digitalisasi yang digunakan pemerintah kalurahan kepada masyarakat. KIM terdiri dari pemuda Sambirejo yang mendapatkan beasiswa kuliah gratis melalui program pemerintah Kartu Indonesia Pintar (KIP). KIM menjadi daya dukung sosialisasi, dokumentasi, pendataan/input data/update data, sistem informasi dan komunikasi di Kalurahan Sambirejo.

Pemerintah Kalurahan Sambirejo menggunakan empat (4) jenis *platform* media berbasis digital yakni aplikasi, website, media sosial dan infrastruktur digital (tabel 1).

Tabel 1 Platform Media Digital Yang Digunakan Di Kalurahan Sambirejo

No	Uraian	Platform Media Digital
1	Media digital yang digunakan secara keseluruhan	1. Website: https://sambirejosid.slemankab.go.id/ https://desasambirejo.smartvillagenusantara.id/ 2. Aplikasi: SimpelDesa, E-Monev, dashboard, IKAS, dan Mitra Bumdes 3. Media Sosial: <i>Whatsapp, Instagram, Facebook, Twitter, Tiktok</i> 4. Infrastruktur: <i>Smart pole, command center</i>
2	Media digital untuk informasi	1. Website 2. Aplikasi 3. Media sosial
3	Media digital untuk surat/administrasi	Aplikasi (SimpelDesa)
4	Media digital untuk interaksi/ komunikasi/ sosialisasi	1. Website 2. Aplikasi 3. Media sosial
5	Akun media sosial yang dimiliki	1. <i>Whatsapp</i> 2. <i>Instagram</i> 3. <i>Facebook</i> 4. <i>Twitter</i> 5. <i>Tiktok</i>
6	Pihak Yang Bekerjasama terkait Platform Digital Yang Digunakan	1. Website menggunakan Smart Village Nusantara (PT Telkom) 2. <i>Website</i> sub domain dari Pemkab Sleman 3. Aplikasi dengan Smart Village Nusantara (PT Telkom) 4. Infrastruktur digital dengan PT Telkom
7	Dana yang dikeluarkan untuk media digital yang digunakan	<i>Website</i> dan aplikasi awalnya dari hibah untuk selama 1 tahun, setelahnya ada biaya tahunan per aplikasi.

Sumber: Observasi dan wawancara (data diolah)

Keempat *platform* media digital tersebut dijelaskan sebagai berikut:

a. Aplikasi

Aplikasi yang digunakan oleh Pemerintah Kalurahan Sambirejo saat ini antara lain: aplikasi SimpelDesa, E-Monev, dashboard, IKAS, dan Mitra Bumdes. Aplikasi-aplikasi tersebut merupakan produk layanan dari Smart Village Nusantara milik PT Telkom. Dalam memaparkan aplikasi-aplikasi yang digunakan Pemerintah Kalurahan Sambirejo tersebut, sebelumnya akan disampaikan penjelasan terkait Smart Village Nusantara. *Smart Village* Nusantara merupakan wujud dukungan PT Telkom terhadap pemerintah dalam membangun Indonesia dari potensi di desa-desa dengan mendukung pengembangan ekosistem desa digital demi ekonomi desa yang berkelanjutan. *Smart Village* atau Desa Cerdas bertujuan untuk meningkatkan sektor-sektor potensi pedesaan seperti pertanian, perikanan dan kerajinan melalui berbagai inovasi, dengan puncak dari inovasi desa adalah terwujudnya desa digital. Implementasi *Smart Village* Nusantara diharapkan menjadikan desa berada pada kondisi selangkah lebih maju dari desa digital, yaitu yang tidak semata berorientasi pada inovasi tetapi juga implementasinya untuk menjawab permasalahan utama pembangunan desa yang didukung pemanfaatan dana desa yang tepat guna. *Smart Village* Nusantara mendorong perwujudan desa yang mandiri dan produktif dengan menghubungkan setiap entitas yang terdapat di desa ke dalam sebuah ekosistem digital untuk peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan, kesejahteraan, dan kualitas hidup masyarakat desa. Merujuk hal tersebut, terdapat 3 aspek ekosistem desa yang menjadi fokus pengembangan *Smart Village* Nusantara yaitu *Smart Government, Smart Economy dan*

Smart Society. Hampir semua produk layanan di 3 (tiga) aspek Smart Village Nusantara di atas diaplikasikan di Pemerintah Kalurahan Sambirejo, namun ada yang belum maksimal digunakan dan ada beberapa yang terus digunakan hingga sekarang.

Adapun aplikasi yang digunakan Pemerintah Kalurahan Sambirejo hingga saat ini adalah:

- 1) Sistem Informasi Manajemen dan Pelayanan Desa (SimpelDesa)
Sistem Informasi Manajemen dan Pelayanan Desa (SimpelDesa) merupakan aplikasi berbasis Web yang terintegrasi dengan *Smartphone*. SimpelDesa memberikan solusi peningkatan administrasi, pelayanan publik, pelayanan dasar sosial berbasis digital dan peningkatan ekonomi desa melalui bisnis partisipatif dengan pola Padat Karya Digital (PKD) untuk menambah Pendapatan Asli Desa (PADes) melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). SimpelDesa memiliki tujuan utama yaitu membentuk ekosistem di kawasan pedesaan melalui kebijakan Pemerintah Desa dan partisipasi masyarakat Desa sehingga perputaran uang berada dalam kawasan Desa/Kabupaten. Aplikasi SimpelDesa untuk *smartphone*, warga dapat mengunduhnya di *playstore*. Aplikasi tersebut khusus untuk warga Sambirejo karena saat *log in* ke aplikasi harus menggunakan NIK dan tanggal lahir sebagai kata sandinya.
- 2) Elektronik Monitoring dan Evaluasi (E-Monev)
Aplikasi *E-Monev* terkaitnya dengan pelayanan di kalurahan. Aplikasi *E-Monev* digunakan untuk memantau perkembangan program pemerintah kalurahan, di aplikasi *E-Monev* dapat dilihat program pembangunan itu sudah diproses berapa persen. Oleh karena itu, Lurah dan Carik dapat memantau perkembangan program pembangunan kalurahan via aplikasi *E-Monev* tersebut. Selain itu, masyarakat pun dapat memantau progress pembangunan yang dilakukan pemerintahan kalurahan melalui *smartphone* mereka.
- 3) Kasir Digital (iKas)
iKas merupakan salah satu produk dari aspek *smart economy* berupa aplikasi yang ditujukan sebagai solusi pencatatan transaksi UMKM (Point of Sales/POS), dan tidak termasuk dalam SimpelDesa. Dengan kata lain, aplikasi iKas ini ditujukan untuk UMKM dan berfungsi semacam mesin kasir yang mencatat transaksi UMKM tersebut. Dan info dari staf TI, aplikasi ini pernah ada yang menggunakan.
- 4) Mitra Bumdes
Mitra BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) adalah Merchant dari BUMDes yang telah melakukan kerjasama/aktivasi antara Pemerintah Kalurahan Sambirejo dengan Smart Village Nusantara (SVN) Telkom Indonesia. Aplikasi ini berbeda dengan aplikasi SimpelDesa, yang dipakai dashboard yang Bumdes. Masyarakat desa dapat dengan mudah melakukan transaksi di Mitra BUMDes secara digital melalui Aplikasi Mitra BUMDes sehingga uang yang masuk ke BUMDes dapat berputar kembali dan berkontribusi meningkatkan perekonomian desa. Mitra BUMDes juga melayani warga yang tidak memiliki Aplikasi atau *e-wallet* sehingga dapat bertransaksi langsung di toko fisik BUMDes. Mitra BUMDes melayani pembayaran segala macam tagihan PPOB seperti listrik, pulsa, paket data, PDAM, dan lain-lain untuk memudahkan warga desa dalam bertransaksi.

b. *Website*

Website pemerintah Kalurahan Sambirejo menggunakan 2 website, salah satunya terintegrasi dengan Pemerintah Kabupaten Sleman dan satu lagi terintegrasi dengan PT Telkom Indonesia.

- 1) *Website* yang terintegrasi dengan Pemerintah Kabupaten Sleman
Alamat websitenya adalah <https://sambirejosid.slemankab.go.id/>. Website ini merupakan sub domain dari website Pemerintah Kabupaten Sleman yaitu <http://www.slemankab.go.id/>. Oleh karena itu, semua kalurahan di Kabupaten Sleman ada, sistemnya dan tampilan atau fiturnya sama. Konten website ini adalah informasi desa ke kabupaten. Website <https://sambirejosid.slemankab.go.id/> belum mempunyai fitur atau menu layanan kependudukan. Website ini diterima Kalurahan Sambirejo setelah adanya website yang berasal dari Hibah PT Telkom.

2) Website yang terintegrasi dengan PT Telkom Indonesia

Alamat websitenya adalah <https://desasambirejo.smartvillagenusantara.id/>. Pengadaan website ini termasuk inovasi kalurahan karena tidak semua kalurahan mempunyai website sendiri selain yang sub domain dari Pemerintah Kabupaten Sleman. Website ini ada sebelum website <https://sambirejosid.slemankab.go.id/>. Website ini dikembangkan di Kalurahan Sambirejo berkat diperolehnya hibah dari program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari PT Telkom tahun 2019. Media Sosial (*Whatsapp, Instagram, Twitter, Youtube, Facebook*, dan Tiktok)

Media sosial yang dimiliki Pemerintah Kalurahan Sambirejo adalah *Whatsapp, Instagram, Twitter, Youtube, Facebook*, dan Tiktok. Di *Instagram* Kalurahan Sambirejo telah ada *link-tree*, sehingga siapapun yang membuka Instagram Kalurahan Sambirejo maka di sana langsung dapat ditemukan nomor whatsapp-nya, link *SimpelDesa, Twitter, Facebook*, Tiktok, dan *Website* Kalurahan Sambirejo.

Aplikasi *Whatsapp* menjadi media sosial utama di Kalurahan Sambirejo. Hal ini terjadi karena hampir yang menggunakan *smartphone* pasti telah menggunakan aplikasi tersebut sehingga masyarakat sudah familiar atau biasa menggunakannya sehingga informasi lebih mudah sampai ke perangkat desa maupun warga masyarakat Sambirejo. Selain itu, aplikasi whatsapp ini dapat menjadi solusi bagi masyarakat yang belum dapat *log in* atau menggunakan aplikasi *SimpelDesa* misalnya warga masyarakat lansia. Grup *whatsapp* ini dimiliki oleh masing-masing Lembaga Kemasyarakatan Desa, perangkat Kalurahan, Padukuhan, kelompok tani, pengrajin, dan lain-lain. Melalui grup whatsapp tersebut informasi apapun dapat dibagikan, tidak hanya informasi terkait internal grup namun juga informasi lainnya di kalurahan Sambirejo, misalnya pohon tumbang, tanah longsor, lelayu, info kalurahan, dan lain-lain.

c. Infrastruktur Digital

Infrastruktur digital di Kalurahan Sambirejo terdiri dari *Smart Pole* dan *Command Center*.

1) *Smart Pole* adalah fasilitas tiang cerdas yang memiliki berbagai fungsi di antaranya penerangan jalan, penyediaan *wifi*, CCTV, deteksi genangan banjir, sensor kualitas udara, dan tombol darurat. Peralatan *Smart Pole* berada di depan kantor Kalurahan Sambirejo

2) *Command Center* adalah layanan dalam mengelola jaringan akses dengan pengendalian yang terintegrasi secara digital. *Command Center* berupa ruangan tempat dimana para staf TI melakukan pekerjaannya terkait digitalisasi di Kalurahan Sambirejo.

Infrastruktur digital ini dibangun oleh PT Telkom menjadi satu paket bersamaan antara *command center, smart pole* dan aplikasi-aplikasi *smart village nusantara* di atas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengguna layanan digital belum banyak dan masyarakat masih banyak yang mengakses layanan secara manual. Pilihan untuk menggunakan lewat manual maupun lewat aplikasi bergantung pada kemantapan masing-masing pribadi masyarakat. Selain layanan digital yang belum terinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Sambirejo, beberapa kendala masih dihadapi pemerintah kalurahan dan masyarakat Sambirejo dalam pelaksanaan digitalisasi layanan di Kalurahan Sambirejo. Beberapa kendala tersebut antara lain:

a. Infrastruktur Terkait Sinyal/Akses Jaringan internet

Topografi Kalurahan Sambirejo adalah perbukitan sehingga wajar menemui masalah dengan sinyal. Kendala ini tidak berarti bahwa Kalurahan Sambirejo merupakan *blankspot area* namun Pemerintah Kalurahan Sambirejo telah berupaya bekerjasama dengan pemerintah kabupaten maupun provinsi terkait infrastruktur pendukung utama ini. Dengan adanya pembangunan tower dari perusahaan *provider* operator seluler, penyediaan *WIFI* di fasilitas umum tiap padukuhan maka masyarakat dapat mengakses layanan digital.

b. Kapasitas warga akan kepemilikan *smartphone* yang sesuai dengan aplikasi

Untuk dapat mengunduh dan menginstal aplikasi seperti *SimpelDesa* dibutuhkan *android* 6.0, sementara masyarakat masih banyak yang menggunakan di bawah versi tersebut.

- c. Kapasitas warga terkait penggunaan teknologi terutama bagi usia lanjut
Warga masyarakat yang tergolong sepuh meskipun masih dapat menggunakan *handphone* namun kesadaran untuk mengunduh dan menggunakan masih rendah disebabkan pemahaman akan teknologi maupun kepentingan menggunakan layanan kependudukan lewat media digital sehingga ketika mengurus surat-surat lebih memilih mengurus secara manual. Untuk menghadapi kendala terkait kepemilikan *smartphone* dan kapasitas/kesadaran masyarakat akan teknologi maka pemerintah Kalurahan Sambirejo mensikapinya dengan menganjurkan 1 (satu) rumah/KK mempunyai 1 (satu) aplikasi. Misalnya jika ada orang tua akan membuat KK atau mengajukan Surat Keterangan Usaha maka dapat menggunakan akun anaknya. Selama masih dalam 1 (satu) KK maka akun siapapun dapat digunakan.

Pada waktu penelitian ini dilakukan, telah ada 449 orang yang mengunduh aplikasi SimpelDesa dari sekitar 2000 KK atau 5850 orang penduduk Sambirejo. Ini berarti sudah hampir seperempat dari jumlah KK yang mengunduh aplikasi SimpelDesa.

2. Digitalisasi Desa Dalam Perspektif *Governmentality*: Studi Kasus Kalurahan Sambirejo, Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman

Pembahasan analisis penyelenggaraan digitalisasi desa di Kalurahan Sambirejo dengan perspektif *governmentality* ini akan dilihat dari empat dimensi yakni visibilitas pemerintah, aspek teknis pemerintah, rasionalisasi pemerintah, dan pembentukan identitas (Dean, 2010).

a. Visibilitas Pemerintah

Digitalisasi desa berawal dan merupakan satu dari sekian manivestasi dari agenda besar Pemerintah Indonesia yakni transformasi digital. Agenda nasional ini dilandasi dengan regulasi dari level undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan di level kementerian, hingga peraturan di level provinsi dan kabupaten.

Salah satu program nasional yang erat dengan digitalisasi desa adalah program dari Kemendesa PDTT terkait lokasi Desa Cerdas, dimana target program ini adalah tercapainya 3.000 desa cerdas di 2024. Seleksi Desa Cerdas ini dengan memperhatikan keterwakilan pada wilayah Indonesia bagian Barat, Tengah, dan Timur, yang dibagi dalam tiga fase yakni 350 desa pada Fase I tahun 2021, 1000 desa pada Fase II tahun 2022, dan 1650 desa pada Fase III tahun 2023. Kalurahan Sambirejo secara resmi ditetapkan sebagai desa cerdas berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 66 Tahun 2023 Tentang Penetapan 1650 Desa Lokasi Desa Cerdas Fase III tahun 2023 tepatnya bulan Februari 2023. Adapun konsekuensi penetapan tersebut sebagai Desa Cerdas adalah menyelenggarakan tata kelola pemerintah kalurahannya berbasis digital.

Berkaitan dengan pertanyaan "siapa dan apa yang akan diatur" dari dimensi visibilitas pemerintah ini, bahwa Pemerintah Kalurahan Sambirejo menjalankan aturan atas program dan kegiatan dari Kemendesa PDTT sebagai Desa Cerdas dan sebagai kalurahan di bawah pengaturan Kabupaten Sleman, Kalurahan Sambirejo pun mengelola *website* tersebut sebagai salah satu platform media digital kalurahan meskipun sebelumnya telah mempunyai website dan aplikasi dari Smart Village Nusantara PT Telkom.

Pengelolaan *website* Kalurahan Sambirejo sub domain dari *website* Pemerintah Kabupaten Sleman merupakan kepatuhan pada program dari Pemerintah Kabupaten Sleman. Namun secara realita, digitalisasi desa di Kalurahan Sambirejo diselenggarakan sebelum adanya keputusan penetapan sebagai lokasi Desa Cerdas dan adanya *website* SID dari Pemerintah Kabupaten Sleman. Penyelenggaraan digitalisasi desa dilakukan atas inisiatif dan motivasi dari Kalurahan Sambirejo sendiri. Adapun proses pembangunan dan pengembangan media digital didanai dari hibah dari program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari PT Telkom tahun 2019.

Digitalisasi desa terselenggara bermula dari motivasi Pemerintah Kalurahan Sambirejo dalam menjalankan pembangunan kalurahannya di era digital ini dan tepatnya saat itu bertepatan dengan masa Pandemi Covid-19. Hal di atas apabila dikaitkan dengan

pertanyaan “hubungan pemerintah dan kepatuhan” dan “hubungan antar lembaga” dalam dimensi visibilitas pemerintah ini, maka penyelenggaraan digitalisasi desa di Kalurahan Sambirejo pada awalnya bukan berasal dari “pemaksaan” Negara atau kepatuhan terhadap peraturan dan program organisasi supra desa. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa penyelenggaraan digitalisasi desa di Kalurahan Sambirejo juga merupakan bentuk intervensi atau afirmasi Negara yang dilakukan melalui “tangan” salah satu BUMN yakni PT Telkom. Intervensi atau afirmasi Negara tersebut bentuknya program hibah melalui mekanisme CSR selama satu tahun. Setelahnya dilanjutkan sendiri oleh Pemerintah Kalurahan Sambirejo.

Penyelenggaraan digitalisasi desa telah disadari Pemerintah Kalurahan Sambirejo sebagai hal yang tidak dapat dipisahkan lagi dengan kehidupan bermasyarakat. Bahkan perkembangan pariwisata yang merupakan program unggulan Sambirejo dapat diraih karena dukungan media digital. Selain itu, penyelenggaraan digitalisasi desa telah menjadi keinginan atau inisiatif dan motivasi Pemerintah Kalurahan Sambirejo sendiri.

Pada saat yang sama, terkait motivasi penyelenggaraan digitalisasi desa ini pun akan terkait dengan motivasi dari seorang Lurah itu sendiri. Sebagaimana diketahui bahwa saat ini teknologi menjadi produk terdepan yang diinginkan banyak orang atau masyarakat. Teknologi menjadi “simbol kemajuan” sebuah daerah atau sebuah institusi. Manusia yang menguasai teknologi menjadi manusia yang lebih “keren” dibanding manusia lain yang tidak paham teknologi, bahkan manusia yang tidak menguasai teknologi ini disebut dengan istilah “gaptek” atau “gagap teknologi” (Kbbi, 2023a), atau belum “melek” teknologi. Dengan demikian menjadi pemandangan lazim, seluruh instansi dalam hal ini kalurahan di penjuru Indonesia berusaha menyelenggarakan digitalisasi di lingkungan mereka.

Permasalahan digitalisasi desa masih berkuat pada infrastruktur dan SDM baik SDM pemerintah kalurahan maupun dari masyarakat sebagai pengguna layanan. Adapun dari penyelenggaraan digitalisasi desa di Kalurahan Sambirejo yang telah mempunyai platform media digital yang mencukupi, namun saat ini masih terus melakukan sosialisasi atau memberikan edukasi agar masyarakat yang mengakses aplikasi dan media sosial lebih banyak. Selain itu terlihat yang berpengaruh besar pada penyelenggaraan digitalisasi desa di Kalurahan Sambirejo adalah faktor kepemimpinan, sebab apabila karakter pemimpin ini tepat maka faktor lain akan dapat diatasi oleh pemimpin tersebut. Lurah Sambirejo dengan bergandengan dengan PT Telkom maka penyelenggaraan digitalisasi di Sambirejo didukung sepenuhnya oleh pihak di luar kalurahan tersebut. Dalam kepemimpinannya yang dijalankan secara kolaboratif, membuka diri dan melakukan komunikasi dengan berbagai pihak di luar kalurahan seperti dengan akademisi atau lembaga pendidikan, LSM, swasta dan pihak lainnya. Dengan berkolaborasi dengan banyak pihak maka beban yang seharusnya ditanggung pemerintah kalurahan akan terbantu dengan dukungan pihak lain. Dari dimensi visibilitas, menurut penulis penyelenggaraan digitalisasi telah jelas sehingga resiko kegagalan program akan rendah. Pemerintah Kalurahan Sambirejo menjalankan aturan Kemendesa PDTT, Kabupaten Sleman ditambah dukungan dari PT Telkom. Selain itu, penyelenggaraan digitalisasi desa berlandaskan keinginan, motivasi dan inovasi sendiri sebagai jawaban kebutuhan masyarakat Sambirejo. Dengan dukungan ketiga lembaga di atas permasalahan yang dihadapi akan dapat diatasi di masa mendatang. Visibilitas pemerintah yang sudah tampak jelas di atas, akan berpengaruh dalam penyelenggaraan digitalisasi desa di Kalurahan Sambirejo secara baik apabila didukung dengan dimensi aspek teknis pemerintah secara memadai.

b. Aspek Teknis Pemerintah

Analisis dan pembahasan pada dimensi ini adalah bagaimana digitalisasi desa di Kalurahan Sambirejo diselenggarakan secara teknis hingga dapat digunakan oleh masyarakat sebagai pengguna layanan. Pembahasan lebih pada sisi platform media digital dibangun dan dikembangkan, pembangunan kapasitas SDM para aktor penyelenggara layanan di kantor kalurahan, dan kapasitas masyarakat yang sangat berpengaruh pada tingkat partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan digital.

Pada awalnya, pembangunan dan pengembangan *website* dan aplikasi dan perangkat lain pendukungnya di Kalurahan Sambirejo didukung sepenuhnya oleh PT Telkom melalui program CSR mereka. Seluruh peralatan yang dibutuhkan diberikan secara gratis oleh PT Telkom. Selain memberikan perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*Software*), PT Telkom juga menyiapkan kapasitas SDM pengelolanya yakni dengan melakukan pendampingan atau training bagi staf TI Kalurahan Sambirejo, konsultasi via *whatsapp* apabila menemui kesulitan, dan melakukan monitoring selama program berjalan. Namun karena program CSR tersebut terbatas waktu yakni satu tahun, maka penyelenggaraannya diserahkan kepada pemerintah Kalurahan Sambirejo beserta pembiayaan selanjutnya.

Penyelenggaraan digitalisasi yang mendapatkan dukungan dari Pemerintah Kabupaten Sleman adalah terkait Sistem Informasi Desa (SID) berupa *website* sub domain dari *website* pemerintah kabupaten. Website tersebut diserahkan pengelolaanya kepada pemerintah kalurahan. Dalam hal ini, hal yang harus dilakukan pemerintah kalurahan adalah menginput data ke dalam website tersebut. Kemudian diharapkan seterusnya untuk mengupdate data yang telah diinput mereka sebagaimana perkembangan yang terjadi di kalurahan. Dalam mengelola website tersebut, staf TI Sambirejo pun mendapatkan pelatihan dan pendampingan dari Pemerintah Kabupaten Sleman.

Tabel 2 Teknis Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Digitalisasi Desa di Kalurahan Sambirejo

Platform Media Digital	Teknis Pemerintah
Website Smart Village Nusantara	
1. Pendanaan pengadaan dan pengembangan	PT Telkom di tahun I. setelahnya pemerintahan kalurahan membayar
2. Pelatihan dan Pendampingan	Pelatihan via zoom, konsultasi diarahkan via zoom
3. Pengawasan	Kunjungan/ pengecekan
Website sub domain pemerintah kabupaten	
1. Pendanaan pengadaan dan pengembangan	Pemerintah Kabupaten Sleman
2. Pelatihan dan Pendampingan	Pelatihan dikumpulkan di Kabupaten Sleman
3. Pengawasan	Kunjungan ke kantor kalurahan tiga kali
Aplikasi dan infrastruktur terkait	
1. Pendanaan pengadaan dan pengembangan	PT Telkom di tahun I, setelahnya untuk aplikasi pemerintahan kalurahan membayar
2. Pelatihan dan Pendampingan	Pelatihan via zoom, konsultasi diarahkan via zoom
3. Pengawasan	Kunjungan/ pengecekan
Partisipasi masyarakat/pengguna layanan digital	
Sosialisasi/ Edukasi	Sosialisasi penggunaan teknologi digital oleh Pemerintah Kalurahan dan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)

Sumber: Observasi dan wawancara (data diolah)

Secanggih dan selengkap apapun sebuah teknologi, namun apabila tidak ada yang menggunakan atau memanfaatkannya maka teknologi tersebut sia-sia. Aplikasi lebih familiar di kalangan anak muda dan tidak berlaku pada masyarakat dengan usia 30-40 tahun ke atas. Saat ini Kalurahan Sambirejo masih terus melakukan edukasi agar partisipasi masyarakat khususnya akses kemudahan yang dikembangkan lewat teknologi aplikasi dan platform media digital yang diselenggarakan Kalurahan Sambirejo dapat dimanfaatkan secara lebih baik dan lebih luas jangkauannya, serta kemudahan-kemudahan yang ditawarkan dapat benar-benar dinikmati masyarakat Sambirejo.

c. Rasionalisasi Pemerintah

Rasionalisasi pemerintah terhadap program disini akan terkait pada tujuan pemerintahan modern sebagaimana aspek pertama dalam makna *governmentality* di atas, bahwa pemerintahan modern hadir untuk memastikan kebahagiaan dan kemakmuran penduduk. Untuk itu, dimensi rasionalitas pemerintah dalam penyelenggaraan digitalisasi desa di Kalurahan Sambirejo akan menganalisis tujuan penyelenggaraan program, manfaat atau

dampak yang akan didapatkan penduduk atau pengguna dari aplikasi berbagai *platform* media digital yang ada.

Teknologi ada untuk mempermudah pekerjaan manusia. Begitu pula dengan aplikasi, seharusnya keberadaannya pun dalam rangka mempermudah penggunanya. Namun dengan banyaknya aplikasi di setiap instansi di atas kalurahan tersebut sepertinya tidak membawa kemudahan namun terlihat seperti parade aplikasi di tiap instansi baik itu tingkat kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah daerah beserta dinas di bawahnya. Bahkan ada yang terjadi tumpang tindih data atau dobel input dan terlihat tidak ada koordinasi atau aplikasi tersebut berjalan sendiri-sendiri tanpa terkoneksi dengan instansi terkait.

Dalam konteks ini digitalisasi desa dari Negara atau supra desa masih pada tataran *media menyetor data*, sedangkan digitalisasi desa yang dikembangkan oleh pemerintah kalurahan masih pada tahap fisik perangkat dan pengelolanya. Dalam hal ini media digital dan staf yang mengelola sudah tersedia, namun masyarakat penggunanya belum memanfaatkannya, artinya penyelenggaraan digitalisasi desa di Kalurahan Sambirejo belum terselenggara sesuai “tujuan” atau “kondisi ideal” yang diinginkan. Kesejahteraan masyarakat sebagai “tujuan” atau “kondisi ideal” yang hendak dituju dari program pemerintah berkaitan dengan digitalisasi di tingkat kalurahan saat ini dapat ditengarai posisinya “masih dalam perjalanan” menuju ke “tujuan” tersebut.

d. Pembentukan Identitas

Dalam pembahasan dimensi pembentukan identitas dalam penyelenggaraan digitalisasi desa adalah masyarakat seperti apa yang akan terbentuk dalam mekanisme penyelenggaraan berbagai layanan digital tersebut. Kemajuan media digital yang diselenggarakan Kalurahan Sambirejo ini kemudian membawa pada pencapaian sebagai juara desa terbaik di Kabupaten Sleman dan menjadi wakil Sleman dalam lomba desa tingkat provinsi tahun 2022.

Namun kemajuan tersebut menjadikan keresahan tersendiri di hati perangkat kalurahan. Di satu sisi teknologi membantu kerja atau pelayanan kalurahan, di sisi lain bertentangan dengan budaya yang tumbuh di lingkungan pedesaan di Kalurahan Sambirejo ini seperti gotong royong, musyawarah, pertemuan-pertemuan warga yang rutin terjadi di pedesaan, tepo seliro dan saling tolong-menolong jika salah satu tetangga membutuhkan. Dalam konteks ini, terjadi “pertentangan” atau *friksi* antara menyelenggarakan digitalisasi yang kemudian memotong birokrasi yang berarti meminimalisir pertemuan fisik, dan program melestarikan kebiasaan-kebiasaan yang telah membudaya dan menjadi “identitas” di lingkungan pedesaan yang berarti masyarakat sering bertatap muka.

Friksi antara digitalisasi desa yang harus diselenggarakan dan sebuah harapan agar masyarakat kalurahan tidak menjadi “masyarakat digital” dapat dimaknai bahwa perangkat Kalurahan Sambirejo setuju dengan digitalisasi desa dan meyakini bahwa tujuannya baik bagi pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Sambirejo tetapi di sisi lain, perangkat Kalurahan Sambirejo tersebut tidak ingin menjadikan masyarakatnya menjadi “masyarakat digital” yang jauh dari “identitas” asli masyarakat Sambirejo.

Masyarakat digital yang dipahami informan adalah masyarakat yang tidak lagi saling berhadapan karena sudah terwakilkan dengan media digital dimana apapun dapat dilakukan dari jarak jauh, tidak lagi ada interaksi dan komunikasi langsung antar masyarakat. Dikawatirkan apabila hal ini terjadi, akan terjadi masalah sosial misalnya tergerusnya kegiatan-kegiatan yang melekat pada karakteristik atau “identitas” masyarakat desa seperti adanya gotong royong, saling tolong menolong antar tetangga dan lain-lain.

Sebagai masukan agar penyelenggaraan digitalisasi desa di Kalurahan Sambirejo tetap berjalan sebagaimana tujuannya namun masyarakat tetap berpegang pada karakter atau “identitas” aslinya maka perlu adanya penguatan literasi digital kepada semua pihak khususnya masyarakat Kalurahan Sambirejo sendiri tanpa kecuali.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh *Akami Technologies*, Jepang memiliki koneksi internet tercepat ketujuh (7) di dunia. Selain itu, Jepang memiliki pengguna internet paling

aktif keenam pada Maret 2017 dengan hampir 93% penduduknya mampu mengakses internet. Kemudian, dengan jumlah penduduk yang sangat besar dan koneksi internet yang canggih, pemerintah Jepang dan masyarakat sipil melangsungkan beberapa kampanye untuk memastikan bahwa ketersediaan koneksi internet digunakan untuk tujuan positif (Syaripudin Asep, 2017). Tujuan positif tersebut termasuk di dalamnya tetap menjaga identitas masyarakat setempat. Sebagaimana yang diketahui, Jepang adalah salah satu negara yang terkenal dengan kemajuan teknologinya yang modern dan sangat pesat, namun di balik itu Jepang juga dikenal memiliki budaya tradisional yang unik dan khas yang masih lestari hingga saat ini.

Dimensi visibilitas dalam menyelenggarakan digitalisasi desa menurut penulis telah jelas sehingga resiko kegagalan program akan rendah. Pemerintah Kalurahan Sambirejo menjalankan aturan Kemendesa PDTT, Kabupaten Sleman ditambah dukungan dari PT Telkom. Selain itu, penyelenggaraan digitalisasi desa berlandaskan keinginan, motivasi dan inovasi sendiri sebagai jawaban kebutuhan masyarakat Sambirejo. Dengan dukungan ketiga lembaga di atas permasalahan yang dihadapi akan dapat diatasi di masa mendatang.

Visibilitas pemerintah yang sudah tampak jelas di atas, akan berpengaruh dalam penyelenggaraan digitalisasi desa di Kalurahan Sambirejo secara baik apabila didukung dengan dimensi aspek teknis pemerintah. Secara teknis dimensi ini telah terpenuhi dan memadai, pembangunan dan pengembangan *platform* media digital di Kalurahan Sambirejo didukung sepenuhnya oleh PT Telkom, termasuk penyiapan kapasitas SDM pengelolanya yakni dengan melakukan pendampingan atau *training*, konsultasi dan monitoring terhadap staf TI Kalurahan Sambirejo. Selain itu dari Pemerintah Kabupaten Sleman mendukung terkait Sistem Informasi desa (SID) beserta infrastruktur pendukung, dan pendampingannya.

Visibilitas pemerintah yang baik ditambah aspek teknis pemerintah yang memadai akan lebih mengakar dengan program pemerintah kalurahan lain apabila digitalisasi desa ini berlandaskan rasionalisasi pemerintah yang sesuai dengan tujuan program pemerintah. Pembahasan dimensi rasionalisasi pemerintah dapat penulis simpulkan bahwa program telah sesuai sebagaimana tujuan program pemerintah yakni kesejahteraan, namun secara realita masih “menuju” tujuan tersebut.

Pada dimensi pembentukan identitas, ditemukan *friksi* pada perangkat pemerintah kalurahan yakni antara digitalisasi desa yang harus diselenggarakan dan sebuah harapan agar masyarakat Sambirejo tidak akan berubah menjadi “masyarakat digital”. Sebagai masukan agar penyelenggaraan digitalisasi desa di Kalurahan Sambirejo tetap berjalan sebagaimana tujuannya namun masyarakat tetap berpegang pada karakter atau “identitas” aslinya maka perlu adanya penguatan literasi digital kepada semua pihak khususnya masyarakat Kalurahan Sambirejo sendiri tanpa kecuali.

Secara singkat, pada penyelenggaraan digitalisasi desa dalam perspektif *governmentality* di Kalurahan Sambirejo dengan melihat ke empat dimensi visibilitas pemerintah, aspek teknis pemerintah, rasionalisasi pemerintah, dan pembentukan identitas, penulis menyimpulkan bahwa digitalisasi desa di Kalurahan Sambirejo diselenggarakan dengan visibilitas yang jelas, ditunjang dengan aspek teknis yang memadai, landasan rasional yang kuat dan telah sesuai sebagaimana tujuan program pemerintah namun secara realita masih “menuju” tujuan tersebut, dan, pembentukan identitas yang memerlukan penguatan edukasi dan literasi digital.

Beberapa catatan kritis dibalik penyelenggaraan digitalisasi desa di Kalurahan Sambirejo, yakni sebagai berikut:

Pertama, pembangunan dan pengembangan digitalisasi desa di Kalurahan Sambirejo dibangun dan dikembangkan oleh “tangan” salah satu BUMN pemerintah yakni PT Telkom Indonesia dan pemerintah Kabupaten Sleman. Sebagai konsekuensi dan kewajiban maka Pemerintah Kalurahan Sambirejo mempublikasikan data yang dibutuhkan negara, berita-berita kegiatan dan perkembangan kalurahan, serta potensi dan kekayaan alam yang dimiliki Kalurahan Sambirejo. Ini berarti teknologi yang dihadirkan di desa menjadi “alat” pemerintah untuk menampilkan kebutuhan data kalurahan dan masyarakatnya sesuai kebutuhannya tanpa harus datang langsung mengambil data tersebut.

Kedua, peraturan digitalisasi desa mengatur desa/kalurahan agar “menampilkan” data nya kepada publik lewat *website* dan data yang harus dialirkan kalurahan melalui aplikasi-aplikasi yang terkoneksi dengan kalurahan milik instansi pemerintah daerah maupun kementerian/pemerintah pusat. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa aplikasi bagi pemerintah kalurahan/desa adalah “media dalam menyeter data”.

Ketiga, stigma yang terbangun dari istilah “*smart village*” dapat memicu pemerintah desa/kalurahan yang tidak bersedia dianggap sebagai “bukan *smart village*” mengambil keputusan untuk menyelenggarakan digitalisasi meskipun belum menjadi kebutuhan masyarakatnya, bahkan menjadikan desa/kalurahan “mengada-adakan” yang belum tentu sudah ada seperti kapasitas SDM penyelenggara layanan yang terlatih, infrastruktur yang memadai, dan masyarakat yang belum “melek” teknologi. Pengambilan keputusan seperti ini tidak efektif dan efisien, bahkan berdampak tidak baik bagi desa/kalurahan tersebut beserta seluruh masyarakatnya.

Keempat, berdasarkan Kepmendagri 050-145/2022, terinci jumlah wilayah administrasi pemerintahan dan pulau seluruh Indonesia sebanyak 34 provinsi, 416 Kabupaten, 98 kota, 7.266 Kecamatan, 8.506 kelurahan, 74.961 desa. Aplikasi dan website yang berasal dari hibah PT Telkom tersebut hanya diberikan gratis selama masa program hibah. Setelah program berakhir apabila Kalurahan Sambirejo tetap akan menggunakan website dan aplikasi tersebut maka terdapat biaya yang harus dibayarkan pemerintah kalurahan untuk setiap aplikasi per tahun. Besaran biaya per aplikasi tersebut bervariasi, ada yang harus membayar Rp 2 juta per aplikasi per tahun. Apabila seluruh desa/kalurahan sebagai pilot project penerima hibah Telkom meneruskan memakai *website* dan aplikasi maka ada 5 desa/kalurahan yang mengirimkan dana ke PT Telkom. Seandainya program sejenis hibah PT Telkom ini meluas ke seluruh Indonesia dan mekanisme biaya per aplikasi per tahun ini diberlakukan sama, maka akan ada 74.961 desa yang mengeluarkan dananya ke BUMN atau pihak pengembang aplikasi tersebut. Seberapa besar dana milik desa/kalurahan yang “disetorkan” ke BUMN atau pihak pengembang aplikasi tersebut tiap tahunnya? Padahal jika melihat “tujuan” diadakannya digitalisasi desa justru menjadi alat pemerintah agar terpenuhi kebutuhan data sebagaimana kepentingannya, sehingga sebenarnya layak apabila kalurahan/desa tidak perlu dibebani biaya lagi agar dana di kalurahan/desa dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lainnya yang lebih urgen.

Kelima, “kesejahteraan” yang menjadi “tujuan program” masih jauh untuk dicapai karena perjalanan penyelenggaraan digitalisasi desa masih pada tahap awal seperti sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.

Keenam, penolakan kepada dampak penyelenggaraan digitalisasi desa berupa terjadinya masyarakat digital yang meninggalkan “identitas” asli masyarakat Sambirejo mengindikasikan kesadaran bahwa perangkat kalurahan dan masyarakat pengguna layanan digital harus mempunyai “bekal kemampuan” dalam menghadapi teknologi yang hadir sehingga memunculkan kebutuhan literasi digital agar perkembangan teknologi tidak menggerus budaya dan adat istiadat yang menjadi ciri khas masyarakat Sambirejo.

KESIMPULAN

Visibilitas Pemerintah Kalurahan Sambirejo dalam menyelenggarakan digitalisasi desa tinggi sehingga resiko kegagalan program akan rendah, hal ini dikarenakan digitalisasi desa dijalankan dengan keinginan atau motivasi sendiri selaras dengan visi dan misi Pemerintah Kalurahan Sambirejo dan sebagai kepatuhan terhadap aturan atas program dan kegiatan dari Kemendesa PDTT dan Kabupaten Sleman. Meskipun permasalahan yang dihadapi yakni infrastruktur terkait sinyal internet, kapasitas masyarakat terkait kepemilikan smartphone yang sesuai dan keterbatasan penguasaan teknologi pada lansia. Disikapi pemerintah kalurahan dengan kebijakan 1 KK 1 akun aplikasi SempelDesa, meneruskan proses sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, serta bekerjasama dengan Kominfo Sleman memasang *Wifi* gratis di fasilitas-fasilitas umum di setiap padukuhan.

Aspek teknis pemerintah dalam penyelenggaraan digitalisasi desa di Kalurahan Sambirejo telah cukup memadai dengan pembangunan dan pengembangan seluruh platform

media digital, dan penyiapan kapasitas SDM pengelolanya melalui pelatihan, konsultasi dan monitoring didukung sepenuhnya oleh PT Telkom. Selain itu, dukungan berasal dari Pemerintah Kabupaten Sleman terutama terkait Sistem Informasi Desa (SID) beserta infrastruktur pendukung, dan pendampingannya.

Infrastruktur pendukung pun ke depannya akan ditingkatkan terutama permasalahan akses jaringan atau sinyal oleh pemerintah daerah maupun PT Telkom, penyelenggaraan digitalisasi desa dilakukan dengan landasan rasional yang secara normatif sudah sesuai sebagaimana tujuan program pemerintah yakni kesejahteraan masyarakat. Secara realita, penyelenggaraan digitalisasi desa masih dinikmati sebagian masyarakat dengan profesi tertentu seperti pelaku usaha/UMKM. Platform media digital masih pada tataran “media untuk menyeter data” dan masih pada tahap fisik perangkat media digital dan pengelolanya, sedangkan masyarakat penggunanya belum banyak yang memanfaatkannya.

Dari segi dimensi pembentukan identitas memerlukan penguatan edukasi dan literasi digital, hal ini karena pada perangkat kalurahan terdapat friksi antara digitalisasi desa yang harus diselenggarakan dan sebuah harapan agar masyarakat Sambirejo tidak menjadi “masyarakat digital” yang jauh dari “identitas” aslinya. Salah satu usulan solusi terkait friksi tersebut adalah pelaksanaan penguatan literasi digital kepada semua pihak khususnya masyarakat tanpa kecuali.

DAFTAR PUSTAKA

- , C. M. (2022). *Ada 204,7 Juta Pengguna Internet di Indonesia Awal 2022*. 23 Maret 2022. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/23/ada-2047-juta-pengguna-internet-di-indonesia-awal-2022>
- Aptika, A. (2021). *Program Desa Digital Bantu Wujudkan Pemerintahan Pintar – Ditjen Aptika*. <https://aptika.kominfo.go.id/2021/12/program-desa-digital-bantu-wujudkan-pemerintahan-pintar/>
- Binapemdes, A. (2022). *Ditjen Bina Pemdes - Kementerian Dalam Negeri*. <http://binapemdes.kemendagri.go.id/blog/detil/epdeskel-sebagai-upaya-penilaian-tingkat-penyelenggaraan-pemerintahan-kewilayahan-dan-kemasyarakatanJournal>.
- Bungin, Burhan. (2012). *Analisis Data penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- CNNIndonesia. (2022). *Hacker Sebut Kominfo Idiot, Netizen RI Malah Ikut Nyinyir*. 7 September 2022. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20220907110817-192-844462/hacker-sebut-kominfo-idiot-netizen-ri-malah-ikut-nyinyir>
- Dean, Mitchell. (2010). *Governmentality Power And Rule In Modern Society*. Second Edition. London: Sage Publication Ltd.
- Elisabeth, A. (2022). *Peta Jalan Kemenkominfo Rancang Indonesia Digital 2021-2024, Ini 4 Poin Prioritasnya*. 30 Juni 2022. <https://www.inews.id/finance/bisnis/kemenkominfo-rancang-peta-jalan-indonesia-digital-2021-2024-ini-4-poin-prioritasnya>
- Faisal, A. (2019). *Yogyakarta disebut salah satu kota yang siap Industri 4.0* - ANTARA News. <https://www.antaraneews.com/berita/976168/yogyakarta-disebut-salah-satu-kota-yang-siap-industri-40>
- Haryanto, A. T. (2021). *Menuju Merdeka Sinyal Internet di 2022*. 14 Desember 2021. <https://inet.detik.com/law-and-policy/d-5853784/menuju-merdeka-sinyal-internet-di-2022>
- Informatika, M. (2022). *Pembangunan Desa Melalui Desa Go Digital | SMA Informatika Ciamis*. 23 April 2022. <https://smainformatika.sch.id/berita/detail/pembangunan-desa-melalui-desa-go-digital>
- Jannah, K. M. (2022). *Sri Mulyani: Kementerian Punya 24.000 Aplikasi tapi Tidak Semua Beroperasi* : Okezone Economy. 11 Juli 2022. <https://economy.okezone.com/read/2022/07/11/320/2627444/sri-mulyani-kementerian-punya-24-000-aplikasi-tapi-tidak-semua-beroperasi>
- KBBI. (2023). *Arti kata digitalisasi* - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. <https://kbbi.web.id/digitalisasi>

- Kharisma, A. (2021). *Cerdaskan" Desa di 2024, Ini 5 Kegiatan Utama Program Smart Village*. 26 Desember 2021. <https://news.detik.com/berita/d-5870818/cerdaskan-des-a-di-2024-ini-5-kegiatan-utama-program-smart-village>
- Li, T. M. (2007). *Governmentality*. *Anthropologica*, 2007, Vol. 49, No. 2 (2007), Pp. 275-281, 49(2), 275–281.
- Microsoft-Indonesia. (2019). *Microsoft – Studi IDC: Tingkat Kepercayaan Konsumen di Indonesia Terhadap Layanan Digital Hanya Mencapai 44%* – Indonesia News Center. 26 Juni 2019. <https://news.microsoft.com/id-id/2019/06/26/microsoft-studi-idc-tingkat-kepercayaan-konsumen-di-indonesia-terhadap-layanan-digital-hanya-mencapai-44/>
- Moleong, Lexy J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*, cetakan ke-36, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset
- Nur, W., & Kayano, S. (2020). *Kuasa Algoritmik Dalam Masyarakat Digital (Interpretasi Pandangan Foucault Atas Teknologi)*. *Teknosains: Media Informasi Sains Dan Teknologi*, 14(1). <https://doi.org/10.24252/TEKNOSAINS.V14I1.12359>
- Prambanan. (2022). *Evaluasi Perkembangan Kalurahan Tingkat Diy Tahun 2022 Kalurahan Sambirejo – Kapanewon Prambanan Kabupaten Sleman*. <https://prambanan.slemankab.go.id/evaluasi-perkembangan-kalurahan-tingkat-diy-tahun-2022-kalurahan-sambirejo/>
- Rohman, I. U. (2022). *Pengembangan Digitalisasi Desa melalui Konsep Smart Village di Desa Karang* | kumparan.com. 23 Januari 2022. <https://kumparan.com/irvan-ulvatur/pengembangan-digitalisasi-des-a-melalui-konsep-smart-village-di-des-a-karangan-1xM06dU92mC>
- Setiadi, T. (2022). *Prediksi Perkembangan Jaringan Internet 2022*|S1 Sistem Komputer S.Kom. 21 Februari 2022. <http://sistem-komputer-s1.stekom.ac.id/informasi/baca/Prediksi-Perkembangan-Jaringan-Internet-2022/fee055b039d2e9ce3396eeecb5d34a5659678326>
- Situmorang, D. M., Hapsari, V. R., & Marpaung, O. (2021). *Analisis Penggunaan Sistem Keuangan Desa Di Daerah 3T*. *JMari*, Vol. 2 No. <https://doi.org/10.31219/OSF.IO/5SGPF>
- Slemankab, A. (2022). *Kalurahan Sambirejo Wakili Sleman Dalam Lomba Desa Tingkat DIY* | slemankab. <https://web3.slemankab.go.id/kalurahan-sambirejo-wakili-sleman-dalam-lomba-des-a-tingkat-diy/>
- Subekti, T., & Damayanti, R. (2019). *Penerapan Model Smart Village dalam Pengembangan Desa Wisata: Studi pada Desa Wisata Boon Pring Sanankerto Turen Kabupaten Malang*. *Journal of Public Administration and Local Governance*, 3(1), 18–28. <https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/publicadminis/article/view/1358>
- Sugiyono. (2019). *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Susanti, I. (2022). *Membangun Desa Mandiri dengan Digitalisasi, Ini Tantangannya* | Halaman 2. 22 April 2022. <https://ekbis.sindonews.com/read/751867/34/membangun-des-a-mandiri-dengan-digitalisasi-ini-tantangannya-1650697463/10>
- Syaripudin Asep, D. (2017). *Implementasi Kerangka Literasi Digital Di Australia, Kanada, Italia, Jepang, Dan Meksiko*. 1–46.
- Taufiq, O. H., Yuliani, D., & Hermawandi, D. (2019). *Tata Kelola Pemerintah Desa Berbasis E-Government Menuju Good Governance*. *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 6(1), 145–152. <https://doi.org/10.25157/dinamika.v6i1.1987>
- TFR. (2022). *Indeks keamanan siber Indonesia terburuk di Asia dan dunia* — The Finery Report. 9 Agustus 2022. <https://www.thefineryreport.com/berita/id/2022/8/9/indeks-keamanan-siber-indonesia-terburuk-di-asia-dan-dunia>
- Vilosa, O. (2021). *Terlalu Gendut! Ternyata Pemerintah Gunakan 27.400 Aplikasi Selama Ini* - Solopos.com. Panduan Informasi dan Inspirasi. 14 Desember 2021. <https://www.solopos.com/terlalu-gendut-ternyata-pemerintah-gunakan-27-400-aplikasi-selama-ini-1216426>
- Yati, R. (2022). *Kecepatan Internet Indonesia Lemot, Kinerja Pemerintah Gagal?* 15 Februari 2022. <https://teknologi.bisnis.com/read/20220215/101/1500669/kecepatan-internet-indonesia-lemot-kinerja-pemerintah-gagal>

- Yin, R. K. (2008). *Studi Kasus, Desain dan Metode*, Penerjemah Mudzakir, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Yunanto, S. E. (2021). *Reclaiming The Government For The Sovereignty Of The People*. Governabilitas. <https://jurnal.apmd.ac.id/index.php/governabilitas/article/view/122/74>